

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Andi Hamzah. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rinneka Cipta.
- Basmanizar. (1997). *Penyelamatan Dan Pengamanan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN)*. Rajawali Pers.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. (n.d.). *Spesifikasi Fitur Rupasasan*. 2018.
- Djoko Prakoso. (1985). *Eksistensi Jaksa ditengah-tengah masyarakat*. Ghalia Indonesia.
- Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Z. I. S. (2017). *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hari Segala. (2018). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar maju.
- Henry Donald Lbn. Toruan. (2020). Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) (*Legal Effectiveness Storage of Confiscated Goods in Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN)*). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14 Nomor 2, 290.
- Imam Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Bumi Aksara.
- Irianto, Syafruddin Kalo, Muhammad Hamdan, dan M. E. P. (2022). Eksekusi Barang Bukti Yang DiRampas Untuk Negara. *Locus Journal Of Acamedic Literature Review*, Volume 1(Issue 2), 72.
- J.E. Sahetapy. (1979). *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*.
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana Cetakan I*. Citra Aditya Bhakti.
- Leden Marpaung. (2010). *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan*. Sinar Grafika.
- Menteri KeHakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, (1985).
https://rutanpurbalingga.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=56

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1994). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana.

Ratna Nurul Afifah. (1988). Barang Bukti Dalam Proses Pidana. Sinar Grafika.

Sanusi, A. (2018). Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (*Optimization of Administration of Items Confiscated by the State at the State's Warehouse of Confiscated Items*).

Soerjono Soekanto. (1982). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto. (n.d.). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2010.

2. Sumber Lain (Perundang-undangan)

KUHAP dan KUHAP. (2007). Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen KeHakiman. Sinar Grafika

Pasal 27 Ayat (1) PP RI Nomor 27 Tahun 1983.
<https://bphn.go.id/data/documents/83pp027.pdf>

Pasal 27 Ayat (2) PP RI Nomor 27 Tahun 1983.
<https://bphn.go.id/data/documents/83pp027.pdf>

Pasal 27 Ayat (3) PP RI Nomor 27 Tahun 1983.
<https://bphn.go.id/data/documents/83pp027.pdf>

Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, (1983).
<https://bphn.go.id/data/documents/83pp027.pdf>

Pasal 30 Ayat (2) PP RI Nomor 27 Tahun 1983, (1983).
<https://bphn.go.id/data/documents/83pp027.pdf>

Pasal 30 Ayat (3) PP RI Nomor 27 Tahun 1983, (1983).
<https://bphn.go.id/data/documents/83pp027.pdf>

Pasal 32 Ayat (1) PP RI Nomor 27 Tahun 1983, (1983).
<https://bphn.go.id/data/documents/83pp027.pdf>

Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, (1983).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1) Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, (2014).

Universal Declaration of Human Rights, Pasal 17 ayat (1) dan (2)., (1948).

Universal Declaration of Human Rights, Pasal 17 ayat (1) dan (2)., (1948).